COMMUNICATION

p-ISSN 2086 - 5708
e-ISSN 2442 - 7535

Analisa Sosial Teks Konflik Tanah Rempang Pada Media Daring Detik.Com

Irwanto[1], *Laurensia Retno[2], Zulfatan Faizin[3], Tommi Parnando[4]
e-mail: irwanto.iwo@bsi.ac.id[1],
Universitas Bina Sarana Informatika[1], Universitas Bina Sarana Informatika[2], Universitas Paramadina[2] , LSPR Institute of Communication and Business[4]
*Coresponding Author

Submitted: 25 Oktober 2024 **Revised:** 24 Januari 2025 **Accepted:** 21 April 2025
Accredited Sinta-4 by Kemdikbud: No. 0041/E5.3/HM.01.00/2023

Abstrak

Konflik Rempang yang melibatkan sengketa hak tanah, hak asasi manusia, dan kepentingan investasi pemerintah dalam proyek Rempang Eco City memunculkan pertentangan antara pemilik tanah adat, perusahaan, serta pemerintah terkait penggunaan lahan. Masalah yang kompleks tersebut diberitakan oleh detik.com dan menjadi fokus dalam penelitian ini. Detik.com menjadi salah satu sumber informasi penting bagi publik. Penelitian ini bertujuan mengungkap wacana yang dibangun oleh redaksi dalam kasus agraria di Rempang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode semiotika sosial Halliday, penelitian ini menganalisa teks pemberitaan detik.com untuk mengungkap wacana konflik agraria Rempang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa detik.com cenderung melihat pembangunan kawasan ekonomi di Rempang dari sudut pandang manfaat ekonomi dan investasi semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Detik.com menjadi aktor politik membela kepentingan tertentu. Kesimpulannya media detik.com melakukan penganiayaan akal sehat terhadap publik melalui wacana yang dibangun dalam pemberitaan kasus agraria Rempang, melalui artikel berjudul "Soal Konflik di Rempang, Mahfud MD: Ada yang Tidak Tersiarkan.

Kata kunci: *detik.com, konflik tanah, analisa teks, semiotika sosial, aktor politik*

Abstract

The Rempang conflict, which involves land rights, human rights, and government investment interests in the Rempang Eco City project, has given rise to conflict between traditional land owners, companies, and the government regarding land use. This complex problem was reported by detik.com and is the focus of this research. Detik.com is an important source of information for the public. This research aims to reveal the discourse built by the editorial staff in the agrarian case in Rempang. Using a qualitative approach and Halliday's social semiotics method, this research analyzes the detik.com news text to reveal the discourse on the Rempang agrarian conflict. The research results show that detik.com tends to view the development of the economic area in Rempang from the perspective of financial benefits and investment alone, without considering the impact on the environment, society, and culture of the local community. Detik.com has become a political actor defending certain interests. In conclusion, detik.com media is carrying out common sense persecution against the public through discourse built-in reporting on the Rempang agrarian case, through an article entitled "Soal Konflik di Rempang, Mahfud MD: Ada yang Tidak Tersiarkan.

Keywords*:detik.com, land conflict, text analysis, social semiotics, political actors*

PENDAHULUAN

Pulau Rempang, terletak di Kepulauan Riau, menyimpan potensi ekonomi besar dengan rencana pembangunan kawasan industri. Namun, di balik gemerlapnya rencana tersebut, terdapat konflik agraria antara masyarakat adat dan PT. Makmur Elok Graha (MEG). Konflik ini berakar dari tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara masyarakat adat yang telah mendiami pulau tersebut selama turun-temurun dengan perusahaan yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).

Selama lebih dari 200 tahun masyarakat adat setempat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya telah dianggap pemilik sah tanah tersebut. Potensi masalah muncul ketika pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas tanah Batam pada tahun 2001-2002 dan lahan tersebut tidak dikelola bahkan dikunjungi oleh investor. Semakin pelik ketika Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) selaku pemegang kewenangan dan pengatur atas pengelolaan lahan di Batam tidak menjelaskan batas-batas serta menguraikannya secara jelas, hingga akhirnya menimbulkan tumpang tindih penguasaan (Berita UGM, 2023)

Konflik Rempang memunculkan isu hak tanah, hak asasi manusia, serta kepentingan investasi pemerintah. Tanah adat akan dibikin Rempang Eco City. Didalamnya akan dibangun berbagai bentuk usaha, seperti pabrik, properti, akan dibangun di sana. Tapi dengan catatan, masyarakat adat diminta untuk keluar dari daerah itu. Masyarakat adat setempat di Rempang jelas tidak terima karena merasa tidak adil, hak asasi mereka diganggu gugat di sana.

Konflik ini melibatkan pertentangan kepentingan antara pemilik tanah, perusahaan, dan pemerintah terkait penggunaan dan penguasaan lahan. Konflik agraria bukan hanya soal kepemilikan tanah, tetapi juga mencakup isu-isu seperti akses terhadap sumber daya alam, hak-hak tradisional masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Konflik di Pulau Rempang berkaitan dengan klaim tanah antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Kondisi geografis dan sosial masyarakat Rempang menambah kompleksitas konflik agraria di sana. Ujung dari semua ini secara ekonomis masyarakat adat kehilangan sumber mata pencaharian karena lahannya dirampas. Dalam aspek sosial masyarakat terintimidasi karena terjadi ketegangan dan polarisasi antara masyarakat adat dan pihak perusahaan yang identik dengan pemerintah. Rencana pembangunan di kawasan tersebut juga mengancam kelestarian serta biota lingkungan sekitar.

Dalam perkembangannya warga setempat menolak dengan tegas rencana yang masuk ke dalam Program strategis Nasional tersebut. Rencana ini ada dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Bentrokan antara warga dengan aparat gabungan pecah saat Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan pengukuran tanah di lokasi. Hal ini mengakibatkan jatuh korban pada pihak warga termasuk perempuan dan anak- anak (detik.com, 2023). Aparat kepolisian membenarkan adanya penembakan gasi air mata dalam proses pengamanan di lokasi (tvonenews.com, 2023). Peristiwa ini tentunya menarik perhatian masyarakat dan menjadi konsumsi media untuk disebarkan.

Kasus agraria di Rempang menempatkan posisi yang saling berhadapan antara masyarakat setempat dengan pemerintah. Tentu pemberitaan mengenai kasus ini tidak hanya berdampak pada opini publik, tetapi juga memberikan sudut pandang cara konflik dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat luas. Karena itu, menganalisa wacana sosial dalam pemberitaan media menjadi penting untuk memahami wacana tentang konflik agraria. Media massa, termasuk platform daring seperti halnya detikcom memegang peran penting dalam memperkuat atau malah mereduksi konflik agraria. Media detikcom ini memegang peran yang signifikan karena predikatnya sebagai peringkat pertama media daring yang dikonsumsi khalayak di Indonesia (databoks, 2022)

Memahami kompleksitas konflik agraria Rempang membutuhkan analisa atas wacana yang beredar pada media massa. detikcom sebagai salah satu media online ternama di Indonesia, menjadi salah satu sumber informasi penting bagi publik. Berita yang dibuat detikcom tidak hanya berdasarkan pemikiran dan niat redaksi tapi juga melibatkan aspek lain seperti halnya norma, konvensi sosial bahkan kepentingan tertentu. Dengan demikian berita kasus agraria di Rempang sebagai produk redaksi detikcom dapat dipahami secara ideasional, interpersonal serta tekstual. Penelitian ini bertujuan mengungkap wacana redaksi detikcom pada kasus agraria di Rempang. Dalam pembahasannya secara deskripsi akan diurai wacana konflik agraria Rempang yang diberitakan detikcom dan mengidentifikasi kepentingan serta aktor yang terlibat dalam wacana tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka untaian rumusan masalahnya adalah: Bagaimana detikcom mengemas konflik agraria Rempang dalam pemberitaannya. Sebagai bentuk upaya menjawab pertanyaan tersebut maka perlu untuk menelaah dan mempelajari serta melampirkan penelitian serupa yang bisa dijadikan referensi sudut pandang terkait.

Sebagai upaya menampilkan aspek kemutakhiran penelitian ini atau *state of the art* maka berikut ditampilkan peneletian relevan yang pernah dilakukan sebelumnya:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Sumber: Penulis, 2024

Judul Penelitian	Hasil	Keterangan
Agrarian Conflict in Yogyakarta Special Region: Investigating Conflict Resolution in the Use of Sultanate Ground in Danurejan (Wirayuda & Efendi, 2024)	indikator-indikator penurunan konflik, negosiasi konflik, resolusi konflik, dan rekonsiliasi konflik tidak berjalan dengan baik karena setiap indikator disimpulkan tidak memberikan hasil yang tepat bahkan berpotensi menimbulkan konflik lebih lanjut.	Subjeknya kawasan Danurejan Yogya dan objeknya konflik agraria. Terdapat kesamaan objek dengan penelitian ini namun beda subjeknya.
Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca-Penerbitan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta) (Illiyani, 2020)	Eksklusivitas hukum agraria pada daerah istimewa Yogyakarta berpotensi menimbulkan polemik pertanahan.	Subjek Daerah Istimewa Yogyakarta dan objeknya polemik pertanahan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada aspek objeknya.
Analisa Framing Pemberitaan Konflik Agraria Kulon Progo terkait Pembangunan Bandara YIA Pada Medcom.id danTirto.id (Aullia & Rubiyanah, 2020)	Kepentingan pemilik modal menjadi pijakan untuk mengkonstruksi pesan pada medianya.	Walau terdapat kesamaan subjek, namun terdapat perbedaan pada objeknya. Konflik agraria Rempang masalah dimulai saat pemberian hak guna tanah adat oleh pemerintah kepada investor. Hak guna tersebut tidak menyebut secara spesifik batasan-batasan terkait aspek sosial masyarakat setempat dan lingkungan hidupnya.
Komunikasi tanpa Deliberasi: Komunikasi Politik Online	Akun twitter @ganjarpranowo yang idealnya mampu menjalin	Memiliki objek penelitian yang relatif sama yakni konflik agraria,

Konflik Agraria Wadas di Twitter @ganjarpranowo (Rachman, 2023)	komunikasi dengan publik untuk penyelesaian konflik agraria di Wadas ternyata tidak berjalan dengan efektif.	namun dengan subjek media online twitter akun @ganjarpranowo

Dalam konteks novelty isi beritanya melibatkan Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahmud MD dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Selain itu objek penelitian yang merupakan kasus agraria di wilayah Rempang sampai penelitian ini dibuat masih belum selesai. Tentunya hal ini menjadi aspek kebaruan yang nyata.

Dalam hal aspek kebaruan subjek pada penelitian adalah media arus utama detikcom dengan narasumber elemen pemerintah yang saat peneltian ini dibuat masih aktif menjabat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wacana tentang konflik agraria Rempang pada media detikcom, mengidentifikasi kepentingan dan aktor yang terlibat dalam wacana tersebut. Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat serta pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria yang lebih adil dan berkelanjutan. Pada sisi lain penelitian ini memberikan kesadaran mengenai kompleksitas konflik agraria serta pentingnya upaya penyelesaian kepada masyarakat umum. Melalui penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang konflik agraria dan analisa wacana sosial bagi para akademisi.

Perlu dipahami terlebih dahulu kedudukan detikcom sebagai media dalam tinjauan kritis. Ini sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dasar penelitian. Mazhab Frankfurt dengan perspektif kritisnya memberikan dampak terhadap studi media. Mazhab ini umumnya berpandangan pesimis terhadap media massa. Studinya menghubungkan peran dominasi ideologi dengan media massa dan budaya. Akan selalu ada ideologi yang cenderung dominan untuk mengarahkan kerja media. Tidak ada media yang bebas nilai dan kepentingan. Kebebasan mengakses media adalah hal yang semu. Meskipun publik punya hak untuk mengakses media apapun, namun justru media yang diakses tersebut diarahkan oleh ideologi, nilai serta kepentingan tertentu. Publik hanyalah objek yang bisa dengan leluasa menjadi bahan eksplorasi kepentingan media. Konsekuensinya aliran ini menganggap hilangnya kebebasan individu serta lemahnya kelas pekerja di mata media.

Menurut teori kritis media massa diproduksi dan disebarluaskan oleh penguasa sistem kapitalis. Lebih lanjut Max Horkeimer melihat media sebagai alat kekuasaan untuk menekan masyarakat (Begtimur, 2022). Dengan kata lain, kelas borjuis dominan mengarahkan, mencuci otak serta memaksakan ideologinya kepada publik melalui media. Perhatian utama teori ialah pencerahan dan pembebasan manusia serta fokus pada kritik terhadap kapitalisme. Ada penekanan bahwa hubungan produksi kapitalis mengarah pada akumulasi surplus di tangan pemilik modal. Hal ini akan memperbudak rakyat dan menjauhkannya dari pencerahan serta kebebasan individu manusia secara hakiki. Sebuah pendekatan yang mengkritik keras positivisme dan mengklaim bahwa metode serta nalar positif menghilangkan individu dari nalar kritis yang sebenarnya diperlukan dalam sebuah proses pembangunan.

Pada pandangan ini ruang publik merupakan sebuah lahan industri kesadaran. Bisa diarahkan untuk kepentingan tertentu, dalam konteks ini kaum kapitalis pemilik modal (Forester, 1988). Pers menjadi media

publik yang memiliki potensi untuk melakukan dialog yang didalamnya terdapat kekuatan struktur dominan. Teori ini menawarkan penjelasan terhadap distorsi dialog politis dalam masyarakat liberal kapitalis. Adanya kekuatan dalam struktur kelas yang terdapat di masyarakat menjadi dasar pandangan teori ini. Ketidaksetaraan distribusi ekonomi politik yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan ketidakadilan tertutup dengan jargon-jargon ideologi kebangsaan yang seolah ideal. Tidak semua kepentingan masyarakat bisa direpresentasikan oleh media. Terdapat kekuatan yang mengganggu dalam sebuah isu atau wacana yang sebenarnya diperlukan masyarakat namun malah justru tidak dipublikasikan.

Kekuatan tersebut secara kasat mata tidak terlihat oleh publik begitu juga dengan karya jurnalistiknya. Bagi masyarakat awam berita yang disampaikan seolah rangkaian fakta biasa tanpa ada muatan tertentu. Sebenarnya terdapat makna serta wacana dibalik fakta berita tersebut. Begitu juga dengan berita kasus agraria di Rempang yang dimuat oleh detikcom. Pada konteks penelitian ini detik.com merupakan portal berita daring yang mempublikasikan peristiwa konflik agraria di Rempang. Terdapat redaksi yang memiliki kontrol penuh terhadap berita yang dipublikasikan. Relasi kepentingan politik turut memapar kerja media dalam kontek ini detikcom. Hal ini berkontribusi terhadap makna berita yang dibuatnya. Institusi berita memiliki hubungan erat dengan politik (Schudson, 2002). Negara-negara dengan sistem demokrasi biasanya memberikan kebebasan berpendapat bagi publiknya, termasuk juga bagi persnya. Berdasar pandangan ini maka detikcom sebagai media berkesempatan untuk berada dengan siapa dan menentukan secara leluasa wacana yang akan diketengahkan pada berita kasus agraria di Rempang. Meskipun idealnya tidak demikian karena demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pada posisi inilah media bisa berpotensi menjadi aktor politik dengan menyampaikan wacana yang tendensinya bisa pro atau kontra dengan pemerintah. Dalam pandangan ini tidak selamanya media menjadi kontrol kekuasaan ataupun pilar keempat demokrasi. Media dengan mudahnya bisa memilih dan menekankan isu-isu tertentu dalam editorialnya. Lembaga ini juga berkesempatan mengkomunikasikan posisi politik tertentu kepada khalayak dan membangun profil ideologis yang berbeda termasuk dalam isu yang dipilihnya (Eilders, 2007). Secara tidak langsung sebenarnya media telah menjadikan dirinya sebagai aktor politik.

Semiotika sosial Halliday sangat relevan digunakan dengan perspektif kritis karena mengacu pada pendekatan yang melihat bahasa dan tanda-tanda sebagai alat untuk memahami dan mengkritisi struktur kekuasaan, ideologi, dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Halliday diambil dari nama ahli linguistik asal Inggris MAK Halliday. Ia mencetuskan model fungsional sistemik yang merupakan ide dasar dalam meneliti wacana. Mengembangkan pendekatan sistemik fungsional yang menekankan hubungan antara bahasa dan konteks sosial. Menurutnya, bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan makna tetapi juga untuk membangun relasi sosial (Angermuller et al., 2014). Semiotika ini mempelajari praktik penandaan dalam konteks sosial, untuk menganalisa pembuatan makna oleh manusia sebagai praktik sosial. Semiotik sosial adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat (Sobur, 2013).

Terdapat tiga hal yang menjadi kajian utama pada semiotika sosial Halliday ini. Pertama, teks, adalah sebuah produk bahasa yang memiliki makna. Sebuah teks adalah suatu unit semantik, yang merupakan unit dasar dari proses semantik. Digunakan dalam interaksi linguistik. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat perberbeda makna teks dari konteks baku seperti dalam kamus dengan makna operasionalnya. Makna teks tidak hanya ditentukan oleh struktur linguistiknya, tetapi juga oleh konteks sosial di mana teks tersebut diproduksi dan dipahami. Teks dalam wacana wacana mempunyai strukturnya sendiri dan tidak dibentuk dari kalimat-kalimat dalam kombinasi dan dari sudut pandang sosiolinguistik. Teks bisa dianggap sebagai yang dikodekan dalam kalimat. Sebuah teks adalah 'apa yang dimaksud', dipilih dari keseluruhan rangkaian pilihan yang mewakili apa yang dimaksud. Dengan kata lain, teks bisa didefinisikan sebagai potensi makna yang teraktualisasi (Cicourel, 2017).

Kedua adalah situasi yang merujuk pada konteks berlangsungnya komunikasi. Hal ini meliputi faktor-faktor seperti tempat, waktu, tujuan komunikasi, peserta komunikasi, dan konteks sosial yang lebih luas. Menurut Halliday, situasi komunikatif mempengaruhi pemilihan bahasa dan struktur bahasa yang digunakan dalam teks. Situasi ini meliputi berbagai faktor, seperti: Medan wacana (field of discourse): Topik atau aktivitas yang sedang berlangsung. Pelibat wacana (tenor of discourse): Hubungan sosial antara partisipan dalam situasi tersebut. Sarana wacana (mode of discourse) yakni bentuk komunikasi yang digunakan, seperti lisan atau tulisan (Gregory, 2008). Medan wacana mengacu pada aspek tindakan sosial yang sedang terjadi di dalamnya serta praktik-praktik yang terlihat dalam teks. Pelibat wacana mengidentifikasi pihak-pihak-pembicara dan sasaran-yang terlibat dalam pembicaraan serta kedudukan dan hubungan di antara mereka. Sedangkan sarana wacana merujuk pada pilihan bahasa masing-masing media, termasuk apakah gaya bahasa yang digunakan bersifat eksplanatif, deskriptif persuasif, metamorfosis, hiperbolis, dan sejenisnya serta dampaknya (H. Halliday M. A. K. & Hasan, 1985).

Ketiga adalah register mengacu pada variasi bahasa yang digunakan dalam situasi sosial tertentu. Register mencakup pilihan-pilihan bahasa seperti kosakata, struktur kalimat, gaya bahasa, dan ragam bahasa yang sesuai dengan konteks komunikatif tertentu. Misalnya, register bahasa yang digunakan dalam percakapan informal di antara teman-teman akan berbeda dengan register bahasa yang digunakan dalam pidato formal di depan publik (M. A. K. Halliday et al., 1964). Bahasa dapat dijabarkan dalam tiga fungsi. Pertama fungsi ideasional, untuk membentuk, mempertahankan dan memperjelas hubungan diantara anggota masyarakat. Kedua fungsi impersonal, untuk menyampaikan informasi diantara anggota masyarakat. Ketiga fungsi tekstual, untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus (wacana) yang relevan dengan situasi (H. Halliday M. A. K. & Hasan, 1985).

Dengan demikian dipahami teks, situasi, dan register saling terkait satu sama lain. Teks diproduksi dalam situasi tertentu dan menggunakan register yang sesuai dengan situasi tersebut. Register, pada gilirannya, membantu menentukan makna teks.

METODE PENELITIAN

Validitas hasil penelitian ditentukan oleh ketepatan dalam memilih metode. Peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai upaya mengungkap wacana konflik agraria Rempang yang diberitakan detikcom dan mengidentifikasi kepentingan serta aktor

yang terlibat dalam wacana tersebut. Menaruh curiga, selalu empati dan berpikir holistik sangat dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan dari peneiltian yang dilakukan. Kualitatif sarat dengan interpretasi dan tidak melibatkan data numerik sehingga hasil penelitian tidak terlepas dari unsur subjektivitas namun tetap dalam kaidah akademis (Hennink et al., 2020). Objek penelitian berbentuk teks dan akan ditelaah serta dianalisa dengan menggunakan semiotika sosial Halliday. Langkah-langkahnya mengidentifikasi dan menganalisa teks, lalu konteks serta register yang terdapat pada berita yang menjadi objek peneltian, dalam hal ini konflik tanah Rempang pada media daring detik.Com

Data diperoleh dan dikumpulkan dari hasil dokumentasi. Selanjutnya dengan semiotika Halliday akan menelaah unsur teks, situasi pada konteks dan variasi bahasa yang digunakan oleh redaksi detik.com dalam memberitakan kasus agraria di Rempang. Analisa dilakukan mulai dari judul dan paragraf-paragraf yang tersusun membentuk tubuh berita. Hasil analisa akan dipaparkan secara naratif, sistematik dan juga dapat mendeskripsikan relasi sosial antar subjek yang menjadi pemberitaan (Angermuller et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berita dengan judul Soal Konflik di Rempang, Mahfud MD: Ada yang Tidak Tersiarkan ditulis oleh reporter Bima Bagaskara dan diunggah ke portal berita detik.com pada Rabu, 13 Sep 2023 14:23 WIB dengan link https://www.detik.com/jabar/berita/d-6928877/soal-konflik-di-rempang-mahfud-MD-ada-yang-tidak-tersiarkan .

Gambar 1. Tangkapan Layar Berita Konflik Rempang Pada Detik.com
Sumber: detik.com, 2014

Nampak terdapat pada web berita ini terdiri dari 13 paragraf dengan disertai satu foto Menkopolhukam Mahmud MD.

Penelitian ini khusus dilakukan pada judul Berita Soal Konflik di Rempang, Mahfud MD: Ada yang Tidak Tersiarkan. Teks : dalam judul ini redaksi ingin merepresentasikan bahwa Menkopolhukam Mahfud M.d mengisyaratkan ada fakta yang tidak disampaikan oleh media terkait dengan pemberitaan mengenai peristiwa konflik agraria di Rempang. Situasi: medan wacana, pada judul ada fakta mengenai kasus agraria di Rempang yang sengaja tidak dipublikasikan dengan tujuan tertentu. Hal ini diketahui melalui pernyataan Mahmud M.d. Redaksi memilih ucapan Mahfud MD untuk menarik perhatian pembaca, mengingat judul sebagai etalase pada sebuah berita. Selain itu dalam juful hendak menginfokan ada fakta yang tidak diketahui publik. Pelibat wacana, pada judul ialah Mahfud MD dengan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Saat peristiwa terjadi Mahmud MD masih menduduki jabatan tersebut. Ia merupakan sosok yang kompeten serta kredibel dalam perkara ini karena

membidangi masalah hukum serta keamanan. Sehingga apa yang dikatakan bisa dipertanggungjawabkan. Sarana wacana, kata *tidak tersiarkan* secara eksplisit menjadi kunci utama pada judul iniPada konteks ini ia merasa perlu menyampaikan kepada publik bahwa ada fakta yang belum atau tidak diketahui masyarakat dan ini bukan karena kebijakan media. Register, pada Judul redaksi detik.com menggunakan kutipan langsung dari narasumber Menkopolhukam Mahmud MD dengan bahasa formal pejabat.

Paragraf 1 atau teks: Bandung - Menko Polhukam Mahfud MD merespons soal bentrok antara warga penghuni Tanah Rempang, Batam dengan aparat keamanan terkait penolakan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Mahfud menyebut, persoalan Rempang terjadi karena ada kesalahpahaman. Situasi medan wacana: Mahfud MD yang dalam konteks ini mewakili pemerintah menginginkan agar masyarakat memahami bahwa kasus agraria rempang terjadi akibat kesalahpahaman. Situasi pelibat wacana: Menkopolhukam Mahfud mewakili pemerintah, warga Rempang dan aparat sebagai subjek yang dibicarakan oleh Mankopolhukam. Status antara Menkopolhukam Mahfud MD dengan aparat berada dalam kubu pemerintahan. Sedangkan warga Rempang merupakan masyarakat biasa. Secara sederhana relasi ketiganya warga dengan pemerintah. Situasi sarana wacana : Redaksi detikcom mengutip keterangan Mahfud MD dan membuat paragraf ini eksplanasi (Tarigan, 2014). Menjelaskan bahwa salah paham menjadi penyebab konflik. Paragraf ini juga tidak menjelaskan pihak yang salah paham. Register: Bahasa yang disampaiikan Mahfud MD formal.

Paragraf 2 atau teks: "Iya kasus Rempang diselesaikan karena ada kesalahpahaman, itu Pak Bahlil (Menteri Investasi/Kepala BKPM) ke sana," kata Mahfud usai menghadiri Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bersih di Kota Bandung, Selasa (13/9/2023). Situasi medan wacana: Motif komunikasi Mahfud MD agar masyarakat paham bahwa salah paham menjadi penyebab konflik dan Menteri Bahlil sedang menuju ke Rempang. Situasi pelibat wacana: dalam konteks permasalahan ini, terdapat dua pelibat wacana yakni Mahfud MD yang menjabat sebagai Menkopolhukam dan menteri investasi Bahlil. Keduanya secara struktural merupakan pejabat pemerintah. Situasi sarana wacana: Redaksi detikcom mengutip keterangan Mahfud MD lalu membuat paragraf keduanya secara eksplanasi. Menjelaskan bahwa salah paham menjadi penyebab konflik dan menteri investasi Bahlil sedang adakan kunjungan ke Rempang. Namun sayangnya dalam paragraf ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perihal kunjungan Bahlil Ke Rempang. Register: Bahasa yang disampaikan Mahfud MD formal.

Paragraf 3 atau teks: "Saya sendiri kalau diperlukan akan menjelaskan dari sisi konstruksi hukumnya, kita harus memberi kepastian hukum terhadap rakyat, terhadap investor, dua-duanya," sambungnya. Situasi medan wacana: Mahfud MD siap menjeaskan dari aspek kepastian hukum. Karena hal ini dibutuhkan oleh rakyat maupun oleh investor. Situasi pelibat wacana: Mahfud MD, rakyat dalam hal ini warga setempat serta investor. Situasi sarana wacana: Redaksi detikcom membuat paragraf ketiganya eksplanasi berdasarkan keterangan Mahfud MD. Intinya kepastian hukum diperlukan bagi rakyat maupun investor. Namun tidak didetilkan mengenai dasar serta bentuk kepastian hukum yang dimaksud baik bagi rakyat maupun investor. Register: Bahasa yang disampaikan Mahfud MD formal.

Paragraf 4 atau teks: Mahfud mengungkapkan, pada bentrokan terkait pengembangan Pulau Rempang ada hal-hal yang tidak tersosialisasikan kepada publik. Hal itu menyangkut kesepakatan antara warga dengan investor yang sudah disepakati. Situasi medan wacana: Mahfud menyatakan ada hal yang tidak tersampaikan kepada publik sehubungan dengan kesepakatan antara warga dengan investor. Situasi pelibat wacana: Mahfud MD, publik, warga dan investor. Situasi sarana wacana: Melalui pernyataan Mahfud MD maka redaksi detikcom membuat paragraf keempatnya eksplanasi mengenai kesepakatan antara warga dan investor yang tidak tersampaikan kepada publik, namun tidak dijelaskan penyebabnya. Register: Bahasa yang disampaikan Mahfud MD formal.

Paragraf 5 atau teks: Yang tidak tersiarkan itu kan bahwa pada tanggal 6 sudah terjadi kesepakatan, tanah yang terikat dalam MoU itu 17.500 hektare, 2.000 akan segera dimanfaatkan dan itu sudah disepakati penduduk di situ 1.200 KK masing-masing akan diberi tanah 500 meter persegi dengan rumahnya tipe 45 seharga Rp 120 juta," ungkap Mahfud.

Situasi medan wacana: Tanggal enam ada kesepakatan antara warga dengan investor yang tidak tersiarkan. Hal tersebut menyangkut tanah yang terikat dalam MoU 17.500 hektare, 2000 nya akan segera digunakan dan ini sudah disepakati oleh 1.200 KK. Masing-masing diberi tanah 500 meter persegi dan tumah type 45 seharga 120 juta. Situasi pelibat wacana: Warga, investor dan Mahfud MD

Situasi sarana wacana: Redaksi detikcom mengutip keterangan Mahfud MD dan membuat paragraf kelimanya secara eksplanasi dan menjelaskan secara deskriptif mengenai pihak yang bersepakat serta isi rincian kesepakatan. Namun pada paragraf ini juga tidak dijelaskan penyebabnya. Register: Bahasa yang disampaikan Mahfud MD formal.

Paragraf 6 atau teks: Selain itu, lanjut Mahfud, setiap orang dalam satu keluarga juga akan diberi biaya hidup sebesar Rp 1.034.636 per orang dan mendapat biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan. Uang itu diberikan bagi keluarga yang rumah penggantinya belum selesai dibangun. Situasi medan wacana: Kompensasi biaya hidup warga Rempang yang terdampak Rp 1.034.636 per jiwa. Sementara bagi keluarga yang rumah penggantinya belum selesai dibangun akan diberikan Rp 1.200.000 per bulan per keluarga. Situasi pelibat wacana: Mahfud M.d serta warga Rempang yang terdampak. Situasi sarana wacana: Redaksi detikcom melalui keterangan Mahfud MD membuat paragraf enam secara eksplanasi. Register: Bahasa yang disampaikan Mahfud MD formal.

Paragraf 7 atau teks: "Kemudian investor juga akan memberikan uang ke peMDa Rp 1,6 triliun untuk menyelesaikan semua dan mengatasi masalah yang terjadi. Jadi itu yang belum dijelaskan kepada masyarakat," ucapnya. Situasi medan wacana: Masyarakat tidak dijelaskan mengenai uang Rp 1.6 triliun yang akan diterima peMDa Rempang dari investor sebesar Rp 1,6 triliun untuk keperluan menyelesaikan semua dan mengatasi masalah yang terjadi. Situasi pelibat wacana: Mahfud MD, Investor dan Masyarakat. Situasi sarana wacana: Redaksi detikcom melalui keterangan Mahfud MD membuat paragraf tujuh secara eksplanasi. Sayangnya redaksi tidak mengeksploitasi lebih jauh kata ‘akan’ dalam uraian Mahfud MD tersebut sebagai upaya dalam memberikan informasi yang jelas kepada publik. Kata ‘akan’ bermakna sesuatu yang hendak terjadi (KBBI KeMDikbud, 2023). Maknanya saat Mahfud MD terlibat sebagai

pelibat wacana dalam berita ini uang sebesar Rp 1.6 triliun tersebut belum sampai ke PeMDa Rempang. Pastinya dana tersebut juga belum sampai ke warga Rempang yang terdampak. Dalam perspektif kritis hal ini nampak ada kesan sebagai keberpihakan redaksi kepada para investor. Idealnya dalam paragraf ini redaksi detikcom menghadirkan narasumber penyeimbang untuk berikan pemahaman yang komprehensif kepada publik. Narasumber bisa dari warga untuk mengkonfirmasi mengenai bantuan – bantuan yang dimaksud ataupundari pihak PeMDa Rempang agar akurat (Porlezza, 2019). Register: Bahasa yang disampaikan Mahfud MD formal namun dalam paragraf terkesan ada tendensi pembelaan terhadap investor.

Paragraf 8 atau teks: Lebih lanjut, Mahfud menyebut, bahwa pemerintah akan menjamin kepastian hukum bagi warga Pulau Rempang terkait dengan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Bahkan, kata dia, jaminan hukum itu sudah disepakati sejak tahun 2004 lalu. Situasi medan wacana: Sejak tahun 2004 pemerintah telah menjamin kepastian hukum warga Rempang yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Situasi pelibat wacana: Mahfud MD, warga Pulau Rempang. Situasi sarana wacana: Redaksi detikcom mengutip keterangan Mahfud MD dan menuliskannya dalam paragraf delapan dengan bentuk eksplanasi. Register: Bahasa yang disampaikan Mahfud MD formal.

Paragraf 9 atau teks: "Bagaimana kalau yang merasa haknya dirampas, untuk diberi haknya dan kompensasi itu, semua sudah dan itu proyek 2004 dan MoU memuat kesepakatan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang," jelasnya. Situasi medan wacana: Pemerintah akan memberi hak kepada warga terdampak berdasarkan MoU kesepakatan tahun 2024. Situasi pelibat wacana: Mahfud MD dan warga yang haknya dirampas. Situasi sarana wacana: Paragraf sembilan detikcom mengutip keterangan Mahfud MD tentang jaminan hukum dalam MoU dan berlaku sebagai undang-undang yang dibuat tahun 2024. Paragraf sembilan interogatif – eksplanasi. Register: Bahasa yang disampaikan Mahfud MD bersifat retoris.

Paragraf 10 atau teks: Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kisruh terkait Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau. Pulau Rempang tengah bergejolak dan sejumlah masyarakat melakukan protes dan menolak relokasi. Situasi medan wacana: Presiden Jokowi mengutus menteri investasi Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan sengketa pada Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City di Batam. Situasi pelibat wacana: Presiden Jokowi, menteri investasi Bahlil dan masyarakat.
Situasi sarana wacana: Redaksi detikcom menulis ulang keterangan yang telah ada pada paragraf satu secara deskriptif. Register: Detik.com gunakan bahasa formal.

Paragraf 11 atau teks: Bahlil menyebut penugasan dari Jokowi adalah tanggung jawabnya sebagai menteri. Menurutnya ia akan menemui warga, namun tidak dilakukan hari ini.
Situasi medan wacana: Sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil bertanggung jawab terhadap kasus sengketa pada Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City di Batam dan ia akan menemui warga. Situasi pelibat wacana: Presiden Jokowi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil dan warga. Situasi sarana wacana: Redaksi detikcom mengutip keterangan Menteri Investasi /Kepala BKPM Bahlil dan dituliskan pada paragraf sebelas secara deskriptif. Register: Bahlil gunakan bahasa formal.

Paragraf 12 atau teks: "Dan kemarin presiden perintahkan saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab menteri yang dari anak kampung," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023) seperti dilansir detikNews.

Situasi medan wacana: Presiden memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil untuk menyelesaikan konflik agrarria di Rempang. Situasi pelibat wacana: Presiden Joko Widodo, Menteri Bahlil dan Komisi VI DPR-RI. Situasi sarana wacana paragraf 12 redaksi detik.com mengutip keterangan Menteri Investasi Bahlil. Dituliskan secara deskripsi oleh redaksi termasuk frase ‘anak kampung’. Register: Bahlil gunakan bahasa formal dengan majas litotes. Merendahkan diri dengan frase anak kampung.

Paragraf 13 atau teks: "Dan insyaallah, kalau saya sudah turun ke lokasi (Rempang). Tapi Pak Sarmuji (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) mohon maaf tidak bisa turun sore ini. Karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk tinjau pabrik LG Battery Cell yang sudah produksi di Jawa Barat," tambahnya. Situasi medan wacana: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil meyakini masalah akan selesai jika ia sudah berada di Rempang. Situasi pelibat wacana: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil, Sarmuji Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Presiden Jokowi. Situasi sarana wacana: Untuk paragraf 13 redaksi detikcom mengutip langsung ucapan Bahlil serta menuliskannya secara deskriptif. Register: Bahlil gunakan bahasa formal.

Pada judul berita “Soal Konflik di Rempang, Mahfud MD: Ada yang Tidak Tersiarkan” redaksi detik.com hanya menggunakan dua narasumber yakni Mahfid MD selaku Menkopolhukam dan Menteri investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ironisnya kedua narasumber berasal dari satu kubu yakni kubu pemerintah. Walaupun dalam beritanya detik.com gunakan diksi Mahfud MD, namun sangat disayangkan keputusan redaksi yang tidak mengakomodir narasumber dari kubu warga Rempang. Teks yang dibangun tidak seimbang. Keterangan hanya diperoleh dari kubu pemerintah yang dalam konteks ini disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud M.d serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Tidak satupun narasumber baik itu warga, perwakilan warga atau pengacara bahkan peMDa setempat yang dijadikan sebagai narasumber sebagai penyeimbang. Dalam berita Mahfud MD yang dikutip detik menarasikan sekaligus menyederhanakan masalah bahwa konflik terjadi hanya akibat salah paham. Tidak mengungkap adanya fakta tumpang tindih penguasaan tanah, intimidasi terhadap masyarakat, ketidak adilan, hak asasinya diusik, ditambah ancaman kelestarian alam serta biotanya. Hal inilah yang membuat masyarakat setempat di Rempang merasa tidak terima.

Dalam aspek sosial masyarakat terintimidasi karena terjadi ketegangan dan polarisasi antara masyarakat adat dan pihak perusahaan yang identik dengan pemerintah. Rencana pembangunan di kawasan tersebut juga mengancam kelestarian serta biota lingkungan sekitar. Masyarakat adat diminta untuk keluar dari daerah itu. Mereka jelas tidak terima karena merasa tidak adil, hak asasi mereka terganggu gugat di sana.

Detik melalui Mahfud MD selaku pelibat wacana aktif pada berita ini menyatakan ada fakta yang tidak tersiarkan mengenai perihal biaya hidup per jiwa, biaya sewa rumah per KK tiap bulan bagi yang belum selesai dibangun rumahnya serta Rp1.6 triliun yang diberikan kepada peMDa setempat. Sayangnya redaksi detik konfirmasi kepada warga terkait kompensasi biaya hidup.

detik.com juga tidak mewawancarai kepala keluarga sehubungan dengan pemberian biaya sewa rumah serta tidak juga melakukan verifikasi kepada peMDa setempat mengenai rencana pemerintah dengan dana sebesar Rp 1,6 triliun untuk menyelesaikan masalah sengketa. Hal ini menjadi timpang ditengah tuntutan jurnalis yang harus komprehensif serta adil dalam membuat berita.

Sebanyak 13 paragraf yang ada dalam isi berita yang berjudul "Soal Konflik di Rempang, Mahfud MD: Ada yang Tidak Tersiarkan" yang dibuat redaksi detik.com tidak ada satupun keterangan ataupun kutipan yang berasal dari pihak warga Rempang. Dalam perspektif kritis narasi yang dibangun oleh detik.com cenderung berpihak pada pemerintah dan dalam berita ini tidak memberikan kesempatan warga setempat untuk diminta keterangannya. Dalam pendangan kritis Horkheimer sudah barang tentu opini yang terbentuk tidak akan memihak ke rakyat. Pemilihan narasumber serta bahasa yang digunakan memiliki kepentingan untuk menyampaikan makna (Angermuller et al., 2014). Pada kasus ini redaksi melalui judul berita yang dimaksud sebelumnya ingin menyampaikan bahwa sengketa yang terjadi di Rempang akibat adanya kesalahpahaman dan menekankan adanya faktor ekonomi yakni berupa kompensasi yang tidak terekspos. Padahal sengketa agraria di Rempang tidak hanya bicara ekonomi melainkan ketidakadilan, hak asasi serta yang tidak kalah penting ialah kelestarian alam serta biota lain yang menyertainya.

Kasus Rempang, sebuah konflik agraria yang melibatkan relokasi masyarakat adat demi kepentingan investasi, menjadi representasi kompleks dari pertarungan makna dan kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Analisis semiotika sosial, yang dikombinasikan dengan teori kritis Max Horkheimer, menawarkan lensa yang tajam untuk memahami wacana dalam kasus ini dibentuk dan dimanipulasi untuk melanggengkan kepentingan kelompok dominan.

Pemikiran teori kritis media massa menyatakan bahwa peristiwa sosial termasuk berita dengan judul "Soal Konflik di Rempang, Mahfud MD: Ada yang Tidak Tersiarkan" telah diproduksi dan disebarluaskan oleh lingkaran sistem kapitalis (Begtimur, 2022). Redaksi detik.com adalah salah satu yang dimaksud oleh para pemikir teori kritis tersebut. Ada peran kelas borjuis yang dominan untuk mengarahkan, mencuci otak serta memaksakan ideologinya kepada publik melalui media. Masyarakat serta kejadian sosial di dalamnya diibaratkan sebagai potensi komoditas kesadaran yang laik dikelola. Diatur untuk makin mensejahterakan kaum kapitalis (Forester, 1988) yang dalam kontek ini adalah investor di Rempang. Slogan-slogan ideologi kebangsaan yang seolah ideal menutup ketidakadilan dalam distribusi ekonomi maupun politik. Ada kekuatan besar yang menghalangi isu yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi itu semua didramatisir dengan sesuatu yang seolah diinginkan publik dengan membangun isu lain sebagai pengalih perhatian masyarakat. Masyarakat terlena dengan isu yang seolah diinginkan tapi sebenarnya bukanlah isu yang dibutuhkan. Terlebih publik banyak yang belum sadar antara kebutuhan dengan keinginan. Dalam konteks ini media telah menjadi aktor politik dengan menggunakan kekuasaannya untuk mengkonstruksikan wacana yang seolah dibutuhkan publik tapi sebenarnya merupakan kebutuhan kapitalis.

Horkheimer menekankan pada pentingnya pemahaman tentang relasi kuasa dalam masyarakat, terutama bagaimana kelompok dominan mempertahankan

kekuasaan mereka melalui berbagai cara, termasuk melalui produksi dan kontrol wacana. Pengabaian terhadap hak warga Rempang diwacanakan melalui media sehingga isu yangdiangkat media detik.com bukanlah hal yang sesuai dengan nilai-nilai apalagi keadilan atas kepemilikan tanah serta hak asasi warga Rempang. Dalam pandagan ini Horkheimer menyebutnya sebagai akal instrumental (instrumental reason), yaitu cara berpikir yang hanya menekankan pada efisiensi dan keuntungan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Leiss, 2019). Media detik.com melihat isu pembangunan kawasan ekonomi di Rempang hanya dari segi manfaat ekonomi dan investasi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Hal ini mereduksi nilai kehidupan menjadi sekadar nilai ekonomi. Dalam kasus Rempang, kebijakan pembangunan mengikuti logika bahwa lahan dipandang sebagai komoditas, bukan ruang hidup masyarakat. Hal ini mencerminkan detik.com cenderung mengakomodir sistem kapitalis dalam melakukan tugas jurnalisnya (Dahms, 2017). Melalui temuan pada peneltian ini jelas bahwa media detik.com tidak mengutamakan hak-hak masyarakat Rempang untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka (Braun, 2017).

SIMPULAN

Dalam tinjauan kritis Max Horkheimer media massa dalam hal ini media detik.com melalui berita yang dibuatnya cenderung mengakomodir kepentingan kaum kapitalis. Detik.com hanya menggunakan narasumber dari pihak pemerintah dalam hal ini Mahfud MD dan Bahlil Lahadalia, tanpa memberikan suara kepada warga Rempang sebagai perwakilan mereka, atau pihak terkait lain yang kopeten dan kredibel. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan informasi dan berpotensi menggiring opini publik untuk memihak pemerintah.

Media detik.com terlampau menyederhanakan Masalah, ketika narasumber Mahfud MD, konflik agraria rempang sebagai akibat salah paham, tanpa menyinggung isu-isu krusial seperti tumpang tindih lahan, intimidasi, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ancaman terhadap lingkungan. Media ini juga tidak melakukan verifikasi kepada warga atau pemerintah daerah mengenai kompensasi ekonomi biaya hidup.

Narasi yang dibangun oleh detik.com cenderung berpihak pada pemerintah dan kepentingan investor, sementara suara dan hak-hak masyarakat Rempang terabaikan. Media ini juga menjadi aktor politik dan bagian dari sistem kapitalis. Pemberitaanya dianggap memiliki kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan kelompok dominan melalui produksi dan kontrol wacana. Media digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat serta hanya menekankan pada keuntungan ekonomi dan investasi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan dampak sosial-lingkungan. Detik.com melihat masyarakat sebagai potensi yang berpeluang untuk dieksploitasi dan menghasilkan keuntungan. Media dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan opini publik sesuai dengan kepentingan tertentu, termasuk kepentingan kapitalis. Dengan demikian detik.com melakukan penganiayaan akal sehat terhadap publik melalui wacana dengan pemberitaan kasus agraria Rempang yang berjudul “Soal Konflik di Rempang, Mahfud MD: Ada yang Tidak Tersiarkan”.

DAFTAR PUSTAKA

Angermuller, J., Maingueneau, D., & Wodak, R. (2014). *The Discourse Studies Reader. An Introduction*. John Benjamins Publishing Company.

Aullia, F. N., & Rubiyanah. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria Kulon Progo terkait Pembangunan Bandara YIA Pada Medcom.id danTirto.id. *Jurnal Studi Jurnalistik*, *2*(1), 72–80. https://doi.org/10.18196/jas.v4i2.16

Begtimur, M. E. (2022). The Critical Theory Perspective on Mass Media. *Jurnal Of Kesit Academy*, *8*(32), 29–50.

Berita UGM. (2023). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/#:~:text=Selama%20masa%20tersebut%2C%20tanah%20di,sebuah%20perusahaan%20atas%20tanah%20Batam.

Braun, J. (2017). *A Critique of Max Horkheimer's Critique of Instrumental Reason*. *The American Sociologist*, *48*(2), 192–207. https://doi.org/10.1007/s12108-016-9314-0

Cicourel, A. V. (2017). *Generative Semantics and The Structure of Social Interaction*. Gangemi Editore.

Dahms, H. F. (2017). *Critical Theory in the Twenty-First Century: The Logic of Capital Between Classical Social Theory, the Early Frankfurt School Critique of Political Economy and the Prospect of Artifice*. In D. Krier & M. P. Worrell (Eds.), *The Social Ontology of Capitalism* (pp. 47–74). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/978-1-137-59952-0_3

databoks. (2022). *Ini Media Online Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia*. Katadata Media Network. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/ini-media-online-paling-banyak-dikonsumsi-warga-indonesia

detik.com. (2023). *Komnas HAM Minta Situasi Rempang Ditangani Humanis*. https://news.detik.com/berita/d-6926638/jokowi-utus-menteri-bahlil-beri-penjelasan-ke-warga-soal-proyek-rempang

Eilders, C. (2007). Media as political actors? Issue focusing and selective emphasis in the German quality press. *German Politics*, *9*(3), 181–206. https://doi.org/10.1080/09644000008404613

Forester, J. (1988). *Critical Theory and Public Life*. MIT Press.

Gregory, M. (2008). Aspects of Varieties Differentiation. *Cambridge University Press*, *3*(2). https://doi.org/DOI: 10.1017/S0022226700016601

Halliday, H., M. A. K., & Hasan, R. (1985). *Language, context, and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective*. Oxford University Press.

Halliday, M. A. K., McIntosh, A., & Strevens, P. (1964). *The Linguistic Sciences and Language Teaching*. Longman.

Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications.

Leiss, W (2023). *The Domination of Nature*. Ontario. McGill-Queen's University Press

Illiyani, M. (2020). Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca-Penerbitan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta). *LIPI*, *22*(3), 367–379. https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106

KBBI Kemdikbud. (2023). *KBBI*. Kemdikbud. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akan

Porlezza, C. (2019). Accuracy in Journalism. In *Oxford Research Encyclopedia of Communicatio*. Oxford University Press. https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/22556/

Rachman, M. N. R. (2023). Komunikasi tanpa Deliberasi: Komunikasi Politik Online Konflik Agraria Wadas di Twitter @ganjarpranowo. *Jurnal Audiens*, *4*(2), 182–202. https://doi.org/10.18196/jas.v4i2.16

Schudson, M. (2002). The News Media As Political Institution. *Annual Review Of Political Science*, *5*, 249–269. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.5.111201.115816

Sobur, A. (2013). *Semiotika Sosial. Remaja Rosdakarya. Bandung*. Remaja Rosdakarya .

Tarigan, G. H. (2014). *Membaca: Sebuah Pengantar Pemahaman dan Membangun Kebiasaan Membaca*. Angkasa Bandung.

tvonenews.com. (2023). *Akui Ada Tembakan Gas Air Mata saat Aparat Bentrok dengan Warga Pulau Rempang, Polri: Tertiup Angin*. https://www.tvonenews.com/berita/151169-akui-ada-tembakan-gas-air-mata-saat-aparat-bentrok-dengan-warga-pulau-rempang-polri-tertiup-angin

Wirayuda, E. N., & Efendi, D. (2024). *Agrarian Conflict in Yogyakarta Special Region: Investigating Conflict Resolution in the Use of Sultanate Ground in Danurejan.International Journal of Science and Society (IJSOC)*. *6*(1), 441–456. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i1.1026